

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Skripsi ini akan mengkaji sebab-sebab Pemerintah Thailand meratifikasi *ILO's Work in Fishing Convention No.188* pada tahun 2019. Sebagai negara eksportir hasil laut terbesar ketiga dunia, kebijakan Pemerintah Thailand ini disoroti oleh beberapa pihak karena tingkat perbudakan manusia di Thailand masih cukup tinggi. Kebijakan Pemerintah Thailand ini dinilai sebagai langkah besar mengingat Thailand merupakan negara pertama yang meratifikasi ILO C188 di kawasan Asia.

### **IA. Latar Belakang Masalah**

Ancaman terhadap keamanan suatu negara saat ini tidak lagi hanya mengenai konfrontasi militer. Ancaman keamanan dapat muncul dari sektor non-militer seperti perubahan iklim, bencana alam, penyakit menular, dan kejahatan lintas negara. Perdagangan dan perbudakan manusia dipandang sebagai salah satu ancaman keamanan yang cukup besar dan serius. Perdagangan dan perbudakan manusia kerap dikaitkan dengan praktik kerja paksa. Berdasarkan *ILO Forced Labour Convention, 1930 (No.29)*, kerja paksa adalah seluruh pekerjaan atau layanan yang dilakukan secara tidak sukarela dan dituntut dari suatu pihak dengan adanya suatu ancaman atau intimidasi (International Labour Organizations, n.d.). Banyak laki-laki, perempuan, hingga anak-anak di seluruh dunia menjadi korban dari fenomena perdagangan manusia dan perbudakan modern. Berdasarkan data *Global Slavery Index* (GIS), sebanyak 40,3 miliar orang di dunia menjadi korban dari perbudakan pada tahun 2016, dimana perempuan mencapai angka 71% (Global Slavery Index, 2018).

Data *Global Report on Trafficking in Person* yang dirilis oleh *United Nation Office on Drugs and Crimes* (UNODC) pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa kasus

perbudakan dan perdagangan manusia di kawasan Asia Timur dan Pasifik mencapai angka lebih dari 85% dengan Cina, Jepang, Malaysia, dan Thailand sebagai negara tujuan (Caballero-Anthony, 2018). Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Thailand menjadi salah satu negara tujuan utama dari perdagangan manusia yang mayoritas korbannya berasal dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Burma. Salah satu yang menjadi sorotan dari kasus perbudakan dan perdagangan di Thailand adalah sektor industri perikanan. Pemerintah Thailand mengestimasi sekitar 300.000 orang bekerja di sektor industri perikanan Thailand di tahun 2014, dimana 90% dari angka tersebut merupakan buruh migran yang rentan terhadap perbudakan dan perdagangan manusia (The Guardian, 2014).

Mayoritas buruh migran yang masuk ke kawasan Thailand datang melalui berbagai pelabuhan, seperti Manachai, Songkhla, Samae San, Ranong, Rayong, Kantang, Pattani, Pak Nam, dan Samut Prakan. Dengan menggunakan jasa agen perantara, buruh migran mencari pekerjaan ke wilayah Thailand dan ditempatkan di pabrik, bidang konstruksi, perkebunan, atau pertanian. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit yang terjebak dalam kasus perdagangan dan perbudakan yang kemudian membawa mereka untuk dipekerjakan secara paksa di laut lepas. *International Justice Mission (IJM)* melakukan survey pada buruh kapal migran pada tahun 2016. IJM menemukan bahwa hanya 13% pekerjaan di atas kapal penangkap ikan dilaporkan dilakukan secara adil dan sesuai aturan, 75% buruh kapal yang melaporkan bekerja selama 16 jam per hari, serta 89% buruh kapal menerima upah dibawah standar minimum (International Justice Mission, n.d.).

Pada bulan Juni 2014 lalu, sebuah media internasional ternama, *The Guardian*, mempublikasikan hasil investigasi terkait kasus perbudakan yang terjadi di industri perikanan Thailand. *The Guardian* mengungkapkan kondisi sesungguhnya dalam industri

perikanan di Thailand. Banyak buruh kapal yang diperlakukan secara tidak layak, seperti dipukul, dipaksa bekerja dalam durasi yang lama, diberi makan hanya satu piring nasi setiap harinya, bahkan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa (The Guardian, 2014). Diperkirakan sekitar 200.000 pekerja migran rentan terhadap eksploitasi di industri perikanan Thailand (Dow, 2019). Dengan adanya pengungkapan ini, Thailand mendapatkan berbagai respon dan desakan dari dunia internasional untuk segera memutus rantai perbudakan yang terjadi di industri perikananannya.

Sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan mengurus isu buruh, *International Labour Organization* (ILO) telah menyusun kerangka mengenai aturan pelaksanaan pekerjaan di atas kapal penangkap ikan dalam bentuk *Work in Fishing Convention (2007) C 188*. Konvensi ini lahir pada Juni 2007 dan hingga tahun 2019 telah diratifikasi oleh tiga belas negara anggota, yaitu Bosnia dan Herzegovania, Argentina, Moroko, Polandia, Afrika Selatan, Kongo, Perancis, Estonia, Angola, Lithuania, Namibia, dan Senegal. (ILO, 2019). ILO C188 memperkenalkan standar minimum internasional yang mengatur kondisi kehidupan dan kerja selama di kapal penangkap ikan, seperti kondisi layanan di atas kapal, akomodasi, keselamatan dan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaan, perawatan medis, usia pekerja, dan jaminan sosial. Konvensi ini berlaku untuk seluruh nelayan dan kapal penangkap ikan yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan komersial. Harapan dari adanya konvensi ini adalah untuk membantu pencegahan terhadap bentuk pekerjaan yang tidak layak dan tidak sesuai sebagaimana mestinya bagi para nelayan, terutama nelayan migran. (ILO, 2017)

Dari sekian banyak negara di kawasan Asia, Thailand merupakan satu-satunya negara yang meratifikasi ILO C188 untuk melindungi kondisi pekerjaan dan kehidupan buruh di atas kapal, yaitu pada tahun 2019.

Kebijakan ini tentunya merupakan suatu langkah yang berarti dimana menunjukkan komitmen Pemerintah Thailand untuk meningkatkan perlindungan terhadap buruh, baik migran maupun domestik, sejalan dengan standar internasional yang akan meningkatkan reputasi industri perikanan Thailand (Ministry of Labour of Thailand, 2018). Dalam memerangi perbudakan dan perdagangan manusia, khususnya dalam industri perikanan. Ratifikasi oleh Thailand ini disambut baik oleh ILO dengan harapan negara lain dapat mengikuti langkah Pemerintah Thailand untuk berkomitmen menjamin kondisi pekerjaan di atas kapal penangkap ikan (ILO, 2019).

## **IB. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu: **“Mengapa Pemerintah Thailand meratifikasi *ILO’s Work in Fish Convention No.188 (ILO C188)*?”**

## **IC. Kerangka Teori (Teori Konstruktivisme)**

Teori Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan baru dalam studi Hubungan Internasional yang muncul pada akhir tahun 1980-an dan berkembang pasca Perang Dingin. Teori konstruktivisme hadir dengan gagasan yang berbeda dengan dua arus utama teori dalam studi HI, yaitu realisme dan liberalisme. Bagi kaum konstruktivis, dunia sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, dimana dunia sosial bersifat intersubjektif. Artinya, masyarakat memiliki peran di dalam dunia sosial karena masyarakat sendirilah yang memaknai dunia sosial tersebut. Konstruktivisme memandang realisme dan liberalisme terlalu materialis dan *agent-centric*. Realisme dan liberalisme beranggapan bahwa HI muncul sebagai produk dari agen yang dijiwai dengan ‘rasionalitas instrumental’. Hal ini memiliki makna bahwa secara rasional para agen berupaya mengejar kekuasaan atau kepentingan dengan utilitas.

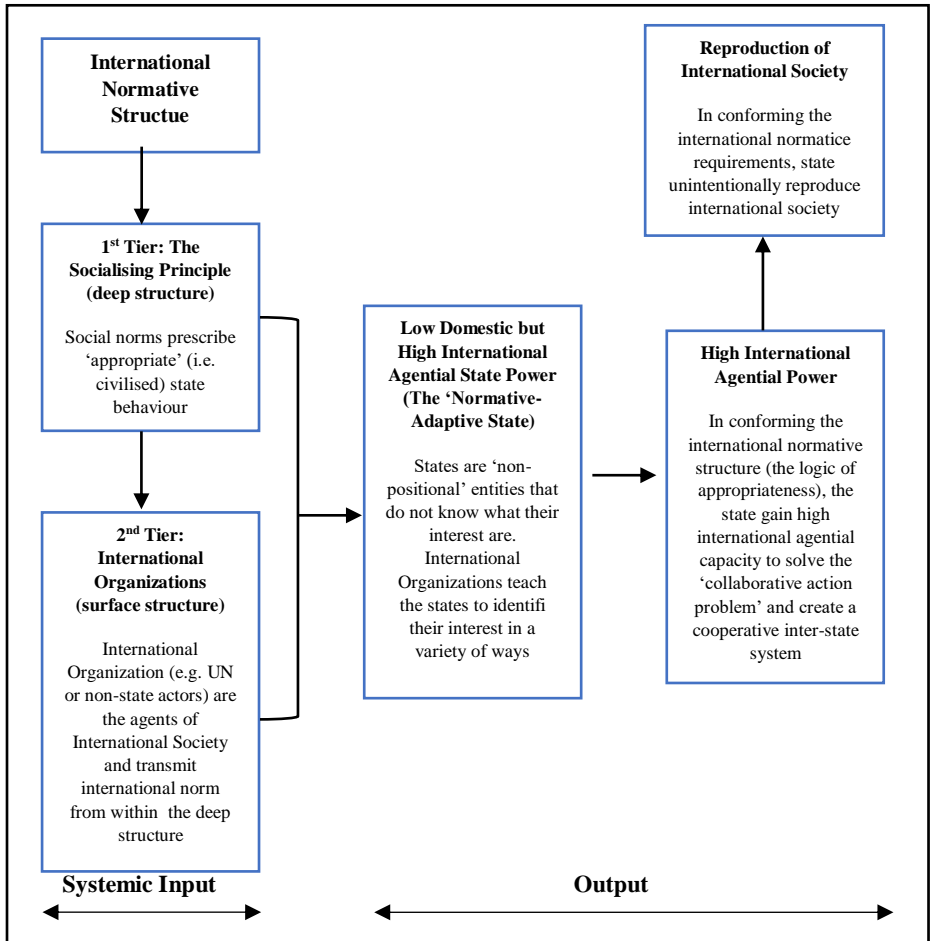
Teori rasionalis beranggapan bahwa agen mengetahui secara jelas apa kepentingan mereka dan mereka mengetahui pula bagaimana mereka merealisasikannya. Berbeda dengan pandangan dua arus utama HI, konstruktivisme meyakini negara tidak mengetahui secara jelas apa kepentingan mereka. Bagi kaum konstruktivis negara memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh struktur normatif sosial. Pola interaksi antar bangsa dibentuk oleh unsur norma, identitas, dan gagasan. Konstruktivisme meyakini bahwa pembentukan identitas merupakan suatu proses yang penting dan sifatnya dinamis, bukan sesuatu yang sifatnya “terberi” dan nyaris tidak berubah (Wendt, Levy, Little, & dkk, 2014). Identitas negara dibangun melalui norma-norma seiring dengan berkembangnya ide dan interaksi yang kemudian akan menentukan kepentingan suatu negara. Ketika norma mengkonstruksi identitas, maka kepentingan akan berubah, kemudian akan berimplikasi terhadap perubahan pada kebijakan negara. Dengan begitu maka kepentingan dan identitas sesungguhnya dibentuk oleh norma yang memandu para aktor yang sesuai dengan pemahaman bersama. Kaum konstruktivis memfokuskan pada *‘logic of appropriateness’*, menggantikan *‘logic of consequences’* yang diangkat oleh kaum rasionalis. Logika ini menganggap bahwa norma akan menentukan perilaku negara yang dianggap ‘pantas’ sesuai dengan norma masyarakat internasional (Hobson, Constructivism, 2003).

*International Society-Centric Constructivism* fokus pada pentingnya struktur di atas agen karena identitas dan kepentingan suatu negara dipengaruhi dan ditentukan oleh struktur normatif yang ada di masyarakat internasional. Menurut Martha Finnemore, norma utama yang paling dominan dalam sistem internasional terdiri dari tiga, yaitu *bureacracy*, *human quality*, dan *market*. Birokrasi merupakan norma yang merujuk pada otoritas. *Human quality* menitikberatkan pada norma yang menyangkut hak asasi manusia serta kesetaraan bagi

semua manusia di bidang politik dan ekonomi. Sedangkan *market* mengacu pada norma yang merujuk pada cara yang dianggap paling tepat untuk mengatur aspek ekonomi.

Finnemore menegaskan bahwa perilaku negara didefinisikan oleh identitas dan kepentingan. Identitas dan kepentingan didefinisikan oleh kekuatan internasional, yaitu norma yang ada di masyarakat internasional. Norma yang berkembang di masyarakat internasional disebarkan kepada negara melalui organisasi internasional. Norma yang ditawarkan organisasi internasional kemudian dapat mempengaruhi negara dengan mendorong negara untuk mengadopsi norma yang diyakini bersama sebagai suatu kebijakan. Menurut Finnemore, organisasi internasional mampu menjadi *active teacher* bagi negara untuk mengadopsi norma yang berkembang di masyarakat internasional.

Dalam Bagan 1, variable kunci dalam struktur normatif internasional memiliki dua tingkat. Tingkat pertama adalah prinsip sosialisasi yang merupakan *deep structure* dalam masyarakat internasional. Pada tingkat pertama ini mengandung norma-norma internasional yang disosialisasikan kepada negara mengenai pola perilaku 'kepantasan'. Finnemore memaknai hal tersebut sebagai kewajiban negara untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma internasional yang mengacu pada perilaku yang 'beradab'. Finnemore juga menjelaskan mengenai tingkat yang kedua, yaitu organisasi internasional yang merupakan *surface structure*. Struktur ini terdiri dari aktor organisasi internasional. Aktor-aktor tersebut merupakan agen yang menyebarkan norma *deep structure*, serta mengajarkan negara mengenai bagaimana berperilaku. (Hobson, Constructivism, 2003)



*Table 1 International society-centric constructivist theory of the state and IR (Finnamore)*

Ratifikasi ILO C188 oleh Pemerintah Thailand pada tahun 2019 merupakan perilaku negara yang didiasari oleh '*logic of appropriateness*'. Identitas Thailand yang dipandang sebagai salah satu negara eksportir hasil laut terbesar di dunia mendorong Pemerintah Thailand untuk

peduli dengan apa yang terjadi di sektor industri perikanan. Seperangkat norma tersebut disebarluaskan melalui *International Labour Organizations* (ILO) yang bertindak sebagai agen. Selain ILO, beberapa NGO seperti *Human Rights Watch* (HRW) dan *Environmental Justice Foundation* (EJF) juga memiliki peran yang cukup kuat dalam mempengaruhi Pemerintah Thailand. HRW dan EJF terus berupaya mengungkapkan fakta data yang terjadi di sektor perikanan Thailand, dan juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Thailand untuk bertindak sesuai norma yang mematuhi keadilan hak asasi manusia.

Melalui norma yang ditawarkan, ILO, HRW, dan EJF mampu mempengaruhi arah kepentingan negaranya untuk melindungi keadilan hak asasi manusia, khususnya dalam sektor industri perikanan. Agen juga mampu mendorong Pemerintah Thailand untuk mengadopsi norma yang berbentuk ILO C188. Hal ini kemudian berimplikasi pada kebijakan Pemerintah Thailand meratifikasi konvensi tersebut. Peratifikasian yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand juga diharapkan oleh ILO mampu mempengaruhi negara-negara lain, terutama di kawasan Asia, untuk turut serta melindungi keadilan hak asasi manusia dengan mengadopsi ILO C188.

## **ID. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan aplikasi teori maka penulis dapat menarik jawaban sementara dari penelitian ini, faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Thailand meratifikasi *ILO Work in Fishing Convention No. 188* pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan normatif Thailand untuk melindungi keadilan hak asasi manusia di negaranya, khususnya di sektor industri perikanan, sesuai dengan norma masyarakat internasional.



2. Dorongan dari lingkungan internasional terhadap Thailand untuk mematuhi norma masyarakat internasional dalam rangka melindungi hak dasar nelayan dan pekerja migran di atas kapal penangkap ikan.

## **IE. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa data berupa deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan alasan Pemerintah Thailand meratifikasi ILO C188. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari data-data sekunder. Sedangkan sumber data yang didapatkan berasal dari dokumen, buku, jurnal, serta internet seperti surat kabar, dan publikasi lain yang relevan dan mendukung penyelesaian penelitian ini.

## **IF. Jangkauan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisa mengenai alasan Pemerintah Thailand meratifikasi ILO C188. Rentang waktu difokuskan pada pengungkapan skandal perbudakan di sektor industri perikanan Thailand oleh *The Guardian* pada tahun 2014 hingga Pemerintah Thailand meratifikasi *ILO Work in Fishing Convention No.188* (ILO C188) pada tahun 2019.

## **IG. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena dalam Hubungan Internasional
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Thailand meratifikasi *ILO's Work in Fishing Convention No. 188* (ILO C188) pada tahun 2019.

### **III. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I:**

Pada bab satu akan membahas Latar Belakang Masalah yang mengungkap fakta dan data yang menjelaskan mengapa permasalahan yang diangkat bisa terjadi. kemudian dilanjutkan dengan penulisan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II:**

Pada bab dua penulis akan membahas mengenai gambaran kasus perbudakan di sektor industri perikanan Thailand yang ramai menjadi sorotan sejak tahun 2014. Pada bab ini juga akan menjabarkan upaya Pemerintah Thailand dalam menangani kasus di sektor industri perikanan mulai dari tahun 2014 hingga 2019. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan mengenai konteks kemunculan ILO C188 sebagai norma masyarakat internasional khususnya dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja di atas kapal penangkap ikan.

#### **BAB III:**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai substansi penelitian, yaitu analisa faktor pendorong Pemerintah Thailand meratifikasi *ILO's Work in Fishing Convention No.188* (ILO C188) pada tahun 2019 lalu dalam perspektif konstruktivisme, khususnya dalam *international society-centric constructivism*.

#### **BAB IV:**

Pada bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari penelitian yang telah disusun mengenai kebijakan Pemerintah Thailand meratifikasi ILO C188.